

Jenderal Polri Terlalu Teknis

PANDANGAN ke depan yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Sutanto dengan perpolisian masyarakat (polmas), sebenarnya sudah mengarah ke pembentukan polisi masa depan.

Sutanto memahami beratnya tugas yang diemban polisi di masa mendatang. Tidak mungkin polisi sendirian dalam menyelesaikan setumpuk tugas. Karena itu, ia berusaha menggandeng masyarakat dengan polmas-nya.

Dengan adanya polmas ini, menurut Bambang Widodo Umar, dosen Ilmu Kepolisian pada Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), gejala yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa lebih cepat diantisipasi.

Polisi berusaha menyerap informasi dari akar informasi itu sendiri, yaitu masyarakat. Dengan memposisikan masyarakat sebagai polisi, akhirnya hal-hal yang mungkin timbul dengan sendirinya bisa tercium lebih dini.

"Ini sebuah langkah yang bagus. Ini harus mendapat dukungan. Tetapi Polri juga harus bisa menyelesaikan masalah atau akar masalah di lingkup birokrasi," katanya.

Bambang Widodo Umar melihat, kebijakan birokrasi yang tidak tepat, sering memunculkan eksese negatif di masyarakat. Kondisi ini tidak pernah dian-

tisipasi kepolisian, padahal itu juga menjadi tanggungjawab Polri. Akibatnya, polisi menjadi petugas pemadam kebakaran. "Setelah eksesnya terjadi, polisi baru turun tangan menanganinya. Ini kan nggak bener," katanya.

Ia menyarankan, sesuai amanat UU No 2/2002, Polri memiliki tugas sebagai penegak hukum dan fungsi pemerintahan.

Implementasi dari UU ini, Polri lebih cenderung ke arah penegakkan hukum.

"Padahal banyak permasalahan yang timbul di masyarakat karena implementasi kebijakan pemerintahan yang tidak tepat," katanya.

Menurutnya, tugas Polri sebagai koorwas PPNS belum dijalankan dengan baik. Padahal, dari perpanjangan tangan Polri di PPNS ini, akan bisa terserap sesuatu yang mungkin muncul.

Ia menceritakan, sebuah kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan sangat mungkin menimbulkan gejala di tingkat tenaga kerja.

"Gejala ini bisa diantisipasi jika ada koordinasi antara Polri dengan departemen terkait. Polri bisa menyarankan agar kebijakan yang akan diambil oleh departemen ditunda terlebih dahulu karena akan memunculkan gejala," katanya.





Bambang Widodo Umar juga mencontohkan hal lain, terungkapnya pabrik narkoba terbesar di Indonesia, sebenarnya hanya menunjukkan bahwa polisi lebih berperan dalam penegakkan hukum. Fungsi polisi dalam pemerintahan belum berjalan.

"Seharusnya itu bisa dicegah jika polisi memiliki link dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) dan Departemen Kesehatan. Keluar masuknya obat-obatan akan bisa terdeteksi sehingga penyalahgunaan obat kimia bisa dicegah," katanya.

Tetapi kenyataan yang ada, menurutnya, justru sebaliknya. Polri tidak pernah di libatkan diri dalam sebuah keputusan, sehingga Polri hanya tinggal menunggu dampak yang ada. "Ini berarti implementasi UU No 2/2002 itu masih setengah hati," katanya.

Langkah ini, menurut Bambang Widodo Umar, sebenarnya telah dirasakan Kapolri dengan adanya beberapa penandatanganan nota kebersamaan (MoU) dengan beberapa lembaga pemerintah. Namun pelaksanaan di lapangan masih sangat minim.

"Seharusnya para jenderal polisi di Mabes Polri langsung menindaklanjuti MoU itu sesuai kewenangannya masing-masing," katanya.

Para jenderal di Mabes Polri itu seharusnya aktif melakukan kerjasama dengan para direktorat jenderal (dirjen) di tiap departemen. Melakukan kerjasama atau koordinasi untuk mendeteksi sedini mungkin munculnya implikasi negatif yang akan timbul dari sebuah keputusan yang akan dikeluarkan seorang menteri. "Para jenderal itu jangan terlalu teknis, tetapi setingkat mereka harus lebih konseptual," katanya. [AR-008]